

REVIEW BUKU
KONSERVATISME ISLAM:
POLITIK IDENTITAS DAN KELOMPOK ISLAMIS DI INDONESIA

BOOK REVIEW
RISING ISLAMIC CONSERVATISME IN INDONESIA
ISLAMIC GROUPS AND IDENTITY POLITICS

Zulfadli

Jurusan Ilmu Politik-FISIP Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manih Padang
E-mail: zulfadli@soc.unand.ac.id

Diterima: 27 September 2022; direvisi 25 Oktober 2022; disetujui 22 November 2022

Judul Buku : Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics
Editors : Leonard C. Sebastian, Syaqq Hasyim and Alexander R. Arianto
Penerbit : Routledge Taylor & Francis Group
Tahun Terbit : 2020
Tebal : 230

Abstract

The rise of Islamic conservatism in post-New Order Indonesia is not only related to strengthening religious attitudes and understandings in religion but has several socio-economic, political, theological implications and significant challenges to democracy and diversity in Indonesia. The presence of Islamic conservatism groups and the development of identity politics have resulted in the religious conservatism movement having a significant influence on people's lives. This book is the latest study explaining Islamic conservatism, focusing on discussing Islamic groups and identity politics at the national, regional, and local levels. Conservative groups use religion as a vehicle in expressing their identity and respond to social, political, and economic issues as part of their political aspirations. The activities of Islamic conservatism groups have changed the face of Indonesian Islam from an inclusive-moderate pattern to an exclusive-literal orientation. The book ends with a prediction that conservative Islamism will still be an important influence on Indonesia's future political and socio-economic developments.

Keywords: *Conservatism, Islam, Identity Politics, Democracy*

Abstrak

Kebangkitan konservatisme Islam di Indonesia pasca Orde Baru membawa sejumlah implikasi sosial-ekonomi, politik, teologi, dan tantangan signifikan terhadap demokrasi dan keberagaman di Indonesia. Kehadiran kelompok konservatisme Islam, gerakan konservatisme agama, dan berkembangnya politik identitas membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Buku berjudul *Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics* ini merupakan studi terbaru yang menjelaskan konservatisme Islam dengan fokus pembahasan pada kehadiran kelompok Islam dan politik identitas di Indonesia, baik yang terjadi di level nasional, regional maupun lokal. Kelompok konservatif tidak hanya menggunakan agama sebagai kendaraan dalam mengekspresikan identitasnya, tetapi juga merespons isu-isu sosial, politik, ekonomi sebagai bagian dari aspirasi politiknya. Aktivitas kelompok konservatisme Islam telah mengubah wajah Islam Indonesia dari yang bercorak inklusif-moderat ke arah orientasi eksklusif-literal. Buku ini diakhiri dengan prediksi bahwa Islamisme konservatif masih menjadi pengaruh penting bagi perkembangan politik dan sosial-ekonomi di Indonesia untuk masa depan.

Kata Kunci: Konservatisme, Islam, Politik Identitas, Demokrasi

Pendahuluan

Studi tentang konservatisme di dunia Islam telah lama menjadi perhatian para sarjana. Konservatisme agama telah lama dipraktikkan dengan cara menolak ide-ide progresif, moderat, liberal, emansipatoris, humanis, demokrasi kesetaraan gender di sebagian besar dunia Islam seperti kawasan Timur Tengah dan wilayah utara Afrika (*Middle East and North Africa* (MENA)) (Al-Qurtuby, 2019), meskipun masih terdapat dunia Islam lain yang dapat beradaptasi dengan sistem politik demokrasi modern. Akan tetapi, sejak dua dasawarsa terakhir, negara-negara muslim yang dikenal mampu beradaptasi dengan demokrasi tersebut, kecenderungannya juga mengalami penguatan konservatisme agama. Konservatisme agama ini misalnya dialami oleh Mesir (Ismail, 1998), Turki (Vedi R Hadiz, 2019), Malaysia (Osman, 2017), dan bahkan di Indonesia. Variasi konservatisme agama yang berkembang di dunia Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia juga mengalami peningkatan konservatisme agama. Sebetulnya, sejak era kolonial konservatisme telah muncul sesuai dengan zamannya masing-masing dalam berbagai bentuk, misalnya, era kolonial ada sarakat islam, menjelang merdeka di BPUPKI ada upaya untuk menjadikan dasar negara berdasarkan Islam, di awal kemerdekaan Indonesia terdapat Darul Islam, serta terdapat partai-partai Islam yang memperjuangkan syariat islam dalam dewan konstituante, dan pada Orde baru muncul komando jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) (termasuk ICMI), sementara pasca-Orde Baru muncul Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Forum Umat Islam (FUI). Perkembangan kontemporer konservatisme agama ini, tentu berbanding terbalik dengan persepsi yang melekat selama ini sebagai salah satu negara muslim yang mengedepankan Islam yang moderat, ramah, toleran, penuh senyum dan kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak dua dasawarsa terakhir, konservatisme agama berkembang semakin meluas dalam kehidupan publik

masyarakat. Akibat peningkatan gelombang konservatisme agama ini, beberapa sarjana seperti Hefner (Hefner, 2019), Bruinessen (Bruinessen, 2011) merevisinya tesisnya tentang Islam Indonesia. Hefner mengungkapkan dengan tesis revisi sipil Islam, sementara Martin mengungkapkan dengan Islam senyum dan mengungkapkan dengan *conservative turn* dalam perkembangan Islam Indonesia.

Studi yang membahas tentang konservatisme agama di Indonesia telah menjadi perhatian para sarjana yang menggeluti studi Islam. Kecenderungan studi beberapa di antaranya adalah konservatisme agama yang berkaitan dengan *Conservative Turn* dan pemahaman keagamaan (Fealy, 2017), (Van Bruinessen, 2013) (Sebastian & Nubowo, 2019) (Fachrudin, 2020). Sementara beberapa studi mengenai konservatisme yang berkaitan dengan organisasi Islam dilakukan oleh Hasyim (2020), Nur Ichwan (2013), dan Burhani (2013, 2016, 2019).

Kajian lain mengenai konservatisme juga dilakukan dengan menitikberatkan fokus pada fenomena religious, sosial dan politik (lihat (Azyumardi Azra, 2019b); (Azyumardi Azra, 2019a); (Azyumardi Azra, 2019c); (Amalinda Savirani, 2020)). Selain itu, konservatisme juga dibahas dalam studi terkait aksi bela Islam (lihat (Mietzner & Muhtadi, 2018); (Priamarizki & Dinarto, 2019); (Aidulsyah & Mizuno, 2020); (Eunsook Jung, 2020); (Luthfie Assaukanie, 2017), dan berkaitan dengan media sosial (lihat (Halimatusa'diyah, 2020); (Kirana & Garadian, 2020); (Abdullah & Mohamed Osman, 2018)).

Dari kajian-kajian yang melihat konservatisme agama dari berbagai sudut pandang, tulisan ini akan mereview salah satu hasil karya dari Leonard C Sebastian, Syafiq Hasyim, Alexander R. Arifianato (2020) yang membahas perkembangan konservatisme Islam di Indonesia. Buku yang disunting oleh Leonard C Sebastian, Syafiq Hasyim, Alexander R. Arifianato (2020) ini terdiri dari 13 tulisan yang sangat menarik. Buku ini merupakan studi terbaru dalam mendiskusikan tentang perkembangan konservatisme Islam di Indonesia yang disebabkan oleh munculnya kelompok Islam (*Islamic Group*) dan

menguatnya politik identitas (*identity politics*) di Indonesia. Kedua aspek tersebut mendorong semakin berkembang konservatisme agama di Indonesia. Perkembangan konservatisme Islam dan hubungannya dengan politik identitas. Beberapa kalangan melihat identitas agama ini telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok Islam konservatif untuk mempengaruhi kebijakan negara. Aktivitas kelompok konservatisme Islam tidak lagi dilakukan secara tersembunyi seperti gerakan bawah tanah pada masa rezim Orde Baru, tetapi justru mengekspresikan identitasnya secara terbuka dengan memanfaatkan sarana demokrasi. Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah upaya mobilisasi yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam (ABI) yang dipimpin oleh koalisi kelompok muslim konservatif dalam menuntut hukuman terhadap Gubernur Jakarta yaitu Ahok yang dianggap mengeluarkan pernyataan penistaan agama Islam.

Konservatisme Islam yang didefinisikan dalam buku ini bukanlah kategori yang permanen dan juga bukan dalam pengertian yang sempit dan kaku. Pengertian konservatisme Islam dalam buku ini dielaborasi secara lebih mendalam pemakaiannya dalam konteks Indonesia dan dalam pengertian yang lebih luas. Sebagai label, istilah konservatif merujuk pada organisasi muslim anti-mainstream yang merasa superior, yang dicirikan dengan sifat mengecualikan orang lain, memonopoli kebenaran dan menilai keyakinan kelompok lain secara salah. Meskipun organisasi Islam semacam itu diberi label konservatif, akan tetapi label tersebut tidak statis. Konservatisme Islam merupakan kombinasi dari isu-isu normatif dan praktis yang berasal dari teks-teks Islam yang mempromosikan kepatuhan harfiah dan eksklusif terhadap syari'ah (etika moral Islam, dan adaptasi pemahaman Islam yang lebih harfiah dalam struktur politik dan hukum Indonesia). Konsep konservatisme Islam berlawanan dengan modernisme Islam atau liberalisme, yang mempromosikan interpretasi Islam kontekstual dan inklusif. (h. 4-5)

Dalam kata pengantar buku ini dijelaskan bahwa istilah konservatisme dalam konteks Indonesia digunakan dalam konteks yang

berbeda-beda. Istilah konservatif pertama kali digunakan Peter Christian Hauswedell (1973) untuk menjelaskan kepemimpinan Soekarno yang dianggap berada di antara konservatif dan radikal. Clifford Geertz (1976) merupakan orang yang menggunakan istilah konservatif dalam menjelaskan perilaku beragama dalam buku *The Religion of Java*. Ia menggunakan kata kolot untuk disamakan dengan konservatisme dalam menggambarkan praktik ideologis teologi Nahdlatul Ulama (NU). Dalam perkembangan selanjutnya, Bruinessen (2013) menjelaskan konservatisme agama dalam pengertian pemahaman keagamaan. Sebelum kehadiran munculnya kelompok Islam baru (*new islamic group*) seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat (FUI), label konservatif sering diberikan kepada (NU), sementara sekarang NU dianggap lebih bercorak moderat. Dari sini kita dapat melihat bahwa istilah konservatisme maknanya dapat berubah dari waktu ke waktu dalam merespon keadaan sosial, budaya atau politik yang berkembang.

Berbagai Wajah Konservatisme Islam di Indonesia

Pada bagian pertama buku ini, dibuka dengan artikel yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi and Rizka Halida yang berjudul *Muslim identity and deprivation Socio-psychological sources of support for Islamist radical groups in Indonesia* (h.14-38). Artikel ini berusaha menjawab seberapa besar dukungan untuk kelompok Islamis di Indonesia dan mengapa beberapa Muslim menjadi radikal dan terlibat dalam kelompok-kelompok seperti itu, sementara yang lain tidak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik ia menemukan bukti bahwa sebageian besar muslim menyatakan dukungan terhadap kelompok radikal Islam di Indonesia, seperti yang menjadi objek dalam penelitian ini: Front Pembela Islam FPI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad dan DI/NII.

Artikel ini menggambarkan individu yang rentan dalam memberikan dukungan terhadap kelompok Islamis di Indonesia. Faktor sosial-

psikologis yang konsisten dan signifikan dalam memberikan dukungan untuk gerakan radikal dari pada faktor sosial-ekonomi. Aspek sosial-psikologis yaitu rasa identitas Muslim yang lebih besar dan perasaan merasa diperlakukan tidak adil mengalihkan dukungan Muslim terhadap kelompok radikal Islam.

Muhtadi menemukan bukti kuat bahwa ketika umat Islam mengidentifikasi diri dengan menggunakan agama sebagai identitas utama di samping identitas nasional atau etnis mereka, mereka lebih cenderung menilai bahwa kelompok agama mereka diperlakukan tidak adil, yang pada gilirannya sangat potensial dalam memberikungan dukungan terhadap kelompok radikal Islam. Selain itu, kelompok Islamis juga merasa terdapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara umat Islam dengan kelompok agama lain, sehingga mereka kurang merasa diuntungkan dalam kehidupan politik.

Narasi seperti ini yang dibingkai oleh kelompok Islamis dalam memperkuat solidaritas kelompok mereka dan memberikan dukungan untuk kelompok radikal Islam. Identitas sebagai seorang Muslim memainkan peran penting dalam mengungkapkan narasi penindasan sehubungan dengan kelompok agama mereka. Perasaan mengalami ketidakadilan kolektif ini yang dirasakan oleh seorang muslim dan merasa bahwa kelompok agama mereka semakin terpinggirkan. Meskipun menjadi bagian dari kelompok agama mayoritas, tetapi mereka umumnya merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dalam hal hak ekonomi dan sipil dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya.

Bagian kedua buku ini berjudul *Islamic orthodoxy at the regional level in Indonesia* yang ditulis oleh Dadi Darmadi (h.41-53). Artikel ini menjelaskan pengaruh dari pemimpin muslim dalam mempertahankan sikap Islam orthodox dengan cara membingkai (*framing*) isu anti Komunis, Anti Syiah-Ahmadiyah dan Anti Jaringan Islam Liberal (JIL) di beberapa daerah di Indonesia. Definisi Ortodoksi Islam dalam penelitian ini adalah seperangkat pemahaman dan praktik keagamaan tertentu yang memperkuat legitimasi kelompok penguasa dalam politik dan agama di mata rakyat.

Penelitian ini menganalisis cara ortodoksi Islam dipahami di berbagai wilayah Indonesia dan bagaimana pemahaman ini membentuk narasi eksklusif. Artikel ini memotret pengalaman ortodoksi Islam di lima kota di Indonesia yaitu Medan, Pontianak, Jakarta, Surabaya, dan Mataram dengan fokus pembahasan pada bagaimana ortodoksi dipahami, ditafsirkan, dan disebarluaskan oleh kelompok-kelompok Islam.

Fokus artikel ini membahas bagaimana narasi, prasangka, dan stereotip telah digunakan untuk memfitnah, mendiskreditkan, kelompok agama lain, dan mendefinisikan bagaimana menjadi seorang muslim di Indonesia. Narasi yang dikembangkan adalah musuh Islam khususnya Komunis, Ahmadiyah, Syiah dan organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL) mendapatkan tempat dalam ruang publik Indonesia. Narasi ini dibingkai sedemikian rupa dan berpendapat bahwa kelompok ini secara aktif telah menghancurkan Islam. Penelitian ini berusaha untuk memeriksa dan mempertanyakan asumsi-asumsi tersebut dan melacak narasi-narasi yang berkembang. Tujuan artikel ini untuk mengeksplorasi kecenderungan dan pola ortodoksi Islam dalam munculnya sentiment anti Ahmadiyah, anti Syiah dan Anti kelompok Islam Liberal. Kelompok arus utama dalam mempertahankan orthodoksi agama telah bersatu melawan kelompok minoritas dan membentuk gerakan Islam anti-Ahmadiyah, anti-Syiah dan anti-liberal. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok Islam arus utama memandang hal-hal berikut: (1) kesediaan berpartisipasi aksi kekerasan agama terhadap kelompok minoritas; (2) sikap anti-minoritas; (3) dukungan organisasi dalam menolak kelompok minoritas; (4) dukungan kekerasan agama terhadap kelompok yang tidak diinginkan.

Temuan penelitian ini menggambarkan kelompok muslim arus utama telah mengalami peningkatan menuju arus ortodoksi Islam. Penerimaan atas ortodoksi Islam merupakan langkah strategis dalam mempertahankan Islam dari ancaman ideologis dan juga politis. Kelompok minoritas Muslim dan non-Muslim dikonstruksi sebagai ancaman bagi komunitas Muslim yang disuarakan oleh pendakwah

Muslim untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri, dan bagaimana narasi ancaman ini diproduksi, dirumuskan dan direformulasi secara terus menerus dalam agenda-agenda tertentu. Penelitian yang dilakukan di lima Kota di Indonesia ini menemukan bahwa dalam upaya mempertahankan ortodoksi Islam, telah terjadi kenaikan intoleransi beragama, terutama berupa sikap dan tindakan yang bertujuan mencegah atau menentang pemenuhan hak kewarganegaraan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini juga mengungkapkan potensi radikalisme agama-sosial, partisipasi dan dalam tindakan dan gerakan yang mungkin mengarah pada kekerasan.

Darmadi memetakan ortodoksi Islam yang terjadi di beberapa daerah dengan kecenderungan sebagai berikut. Di Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Lombok, sejumlah tokoh publik Muslim menuturkan bahwasanya Islam Indonesia terancam karena bahaya liberalisme agama. Wacana ini sangat mendominasi di internet dan media sosial. Narasi yang dikembangkan adalah kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) mengancam masa depan Indonesia dan pengaruhnya dalam merusak generasi muda. Kelompok ini disebut sebagai “antek-antek Barat yang berusaha merusak Islam”, terutama karena kepiawaiannya menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dalam merusak ajaran agama.

Di Lombok, Kelompok Ahmadiyah juga dianggap sebagai ancaman oleh kelompok Muslim arus utama karena berkeyakinan bahwa ada Nabi selain Muhammad dan mereka juga memiliki tafsir mereka sendiri. Mereka juga dianggap menciptakan bid'ah untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Masalah terus bertambah ketika kelompok Ahmadiyah memperoleh pengikut yang signifikan, di pusat ortodoksi Islam sebagai basis utama organisasi Islam Nahdatul Wathan, sehingga kehadiran Ahmadiyah dianggap mengancam Islam.

Di Jawa Timur, Islam Syiah dianggap berbahaya karena ajaran ajaran yang berkaitan dengan Sahabat, pernikahan, masalah-masalah lainnya. Organisasi Islam, seperti FPI, Hidayatullah dan Dewan Dakwah Islam (DDI) mereka bersuara lantang dalam

penolakan mereka terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Akan tetapi organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, Al-Haramain cenderung mengikuti keputusan MUI dan Perda (peraturan daerah) dalam mengatur keberadaan kelompok Ahmadiyah, Syiah. Di Jawa Timur secara umumnya ulama (MUI) dan pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga ketika terdapat isu agama, dalam hal ini yang melibatkan Ahmadiyah dan Syiah dapat diantisipasi dan diatasi dengan cepat.

Di Pontianak, organisasi FPI (Front Pembela Islam) dan MUI tidak hanya memprotes keberadaan Ahmadiyah akan tetapi juga melakukan pengusiran terhadap eks anggota Gafatar dan juga konflik masa lalu dengan suku Dayak di Kalimantan Barat. Sikap ini merupakan bentuk pembelaan sikap bahwa Islam mereka mengalami ancaman, baik secara ideologi maupun politik.

Di Medan Sumatera Utara sentimen negatif terhadap Ahmadiyah, Syiah dan JIL tetap sering terjadi. Narasi ancaman tetap menonjol dalam wacana publik, terutama pada pertemuan keagamaan. Kasus di lima daerah disebutkan di atas merupakan contoh bagaimana narasi, lisan dan visual, ancaman dipertahankan, dirumuskan dan direformulasi di Indonesia. Gagasan menjaga ortodoksi Islam terjadi seiring dengan peristiwa politik dan agama yang sedang hangat dibicarakan di suatu wilayah. Dalam upaya mempertahankan agama, banyak kelompok Islam arus utama di Indonesia telah memprotes dan menyelenggarakan berbagai demonstrasi jalanan terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut. Mereka telah meluncurkan gerakan anti-Ahmadiyah, anti-Syiah, anti-Islam liberal untuk mencari dukungan publik untuk mempertahankan keaslian Islam. Ortodoksi, dalam arti mengikuti aturan umum atau kepercayaan agama yang diterima secara umum, digunakan sebagai kerangka untuk membela Islam. Narasi ortodoksi Islam dirumuskan dan reformulasi sebagai cara dalam mempertahankan Islam yang disebabkan oleh sejumlah faktor dan konteks pemicunya.

Bagian ketiga buku ini adalah artikel berjudul *Examining the growth of Islamic conservatism in Indonesia The case of West*

Java yang ditulis oleh Irman G. Lanti, Akim and Windy Dermawan (h. 56-79). Artikel ini menggambarkan secara mendalam tentang tumbuhnya konservatisme Islam di provinsi Jawa Barat dalam tiga dekade terakhir. Artikel ini menemukan bahwa konservatisme Islam mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, pengaruh pemberontakan Darul Islam (DI) pada 1950-an/1960-an yang telah meninggalkan bekas luka besar di antara banyak ulama dan sekolah Islam di Jawa Barat, yang dituduh oleh Angkatan Bersenjata Indonesia (TNI) mendukung pemberontakan. *Kedua*, tidak seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah, NU tidak memainkan peran utama dalam menengahi masalah-masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Sebaliknya masalah keagamaan tersebut diselesaikan oleh organisasi Islam yang cenderung konservatif dengan jumlah yang relatif lebih sedikit, sehingga gelombang konservatisme Islam mengalami pertumbuhan yang pesat selama tiga dekade terakhir. Hal ini dapat dilihat dari penerapan peraturan bernuansa syari'ah Islam terbanyak di Indonesia semenjak reformasi.

Bagian keempat buku ini ditulis oleh Ahmad Najib Burhani yang berjudul *Resisting conservatism Muhammadiyah's experience through its social activities* (h. 80-94). Artikel ini menguraikan posisi Muhammadiyah atas tiga isu kontroversial yang terjadi pasca unjuk rasa anti-Ahok yang dikenal sebagai Aksi Bela Islam, pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi keagamaan, kontroversi terkait Partai Komunis Indonesia (PKI), dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghayat Aliran Kepercayaan. Organisasi Muhammadiyah dalam merespon isu-isu tersebut tetap setia dalam mengedepankan spirit organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga seperti terlihat pada budaya dan politik baru dalam organisasi ketika mengembangkan dakwah kultural, tafsir tematik, hubungan inklusif dengan minoritas, dan *darul 'ahdi wa al-syahadah*. Beberapa upaya tersebut pada akhirnya berusaha memberikan pandangan berimbang dan bisa beradaptasi terhadap

terjadinya perubahan dalam masyarakat Indonesia.

Artikel ini memberikan wawasan terbaru tentang evolusi Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-agama. Muhammadiyah merupakan organisasi dengan visi gerakan keagamaan dengan penekanan yang kuat pada aspek sosial, pendidikan, dan keagamaan. Ini adalah posisi yang terus dipegang dan dipelihara oleh organisasi ini sepanjang sejarahnya. Anggota Muhammadiyah telah secara tegas menginternalisasi nilai ini dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari mereka. Ajaran ini telah dilestarikan, dihargai, dan semakin diperkuat dengan menanamkan tradisi penghormatan yang tinggi, pemujaan kepada para aktivis yang telah mendedikasikan sebagian besar hidup mereka, serta mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial.

Tiga isu yang terjadi pada tahun 2017 yaitu pelarangan HTI, kontroversi atas PKI, dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penghayat Kepercayaan masuk dalam spektrum budaya berdirinya Muhammadiyah. Dalam merespons isu tersebut, Muhammadiyah menjadi mudah ditarik ke dalam kecenderungan Islamis dan konservatif. Untuk mengatasi masalah ini, pernyataan resmi dari Muhammadiyah telah mencoba memahami dinamika dan keragaman anggotanya, serta tetap berada dalam koridor ideal demokrasi dan Islam. Posisi Muhammadiyah berbeda dengan kelompok Islamis seperti FPI dan FUI, yang dipandu oleh supremasi Islam dan sifat yang eksklusif terhadap keyakinan dan ideologi yang berbeda. Teologi al-Ma'un telah mencegah Muhammadiyah dari kecenderungan Islamisme dan kecenderungan fundamentalisme.

Bagian keenam dalam buku ini ditulis oleh Asep Muhammad Iqbal dengan judul *Challenging Moderate Islam in Indonesia NU Garis Lurus and its construction of the "authentic" NU online* (h. 95-115). Artikel ini membahas munculnya fraksi konservatif di lingkungan internal organisasi Nahdlatul Ulama yang bernama NU Garis Lurus. NU Garis Lurus merupakan reaksi terhadap NU struktural yang dinilai telah menyimpang dari ajaran asli NU yang otentik sebagaimana

diajarkan oleh pendirinya Hasyim Asy'ari. NU Garis Lurus menilai bahwa NU telah melenceng dari nilai-nilai dasarnya, terutama di bawah kepemimpinan era Said Agil Siradj dengan mendukung kelompok Syiah, mendukung paham Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme, serta mendukung Ahok dalam mencalonkan gubernur DKI, cenderung terbuka terhadap agama lain, serta mengkritik keras gagasan Islam Nusantara. Sebaliknya, NU Garis Lurus berupaya mengembalikan pengikut NU ke ajaran murni KH Hasyim Asy'ari, yaitu Sunni, bermazhab Syafi'i, anti-sekularisme, anti-pluralisme, dan anti-liberalisme, serta menilai sekte Syiah menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam.

NU garis lurus menggunakan Situs web www.nugarislurus.com dalam menyebarkan pandangannya. Selain itu, para pemimpin NU garis lurus juga menyebarkan paham konservatifnya melalui Situs pribadinya di media sosial untuk memperoleh pengikut dan dukungan dari masyarakat. Misi NU Garis Lurus, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah mengembalikan Nahdlatul Ulama ke jalur semula – Khittah NU 1926. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa internet telah menyediakan ruang para pendukung NU Garis Lurus dan memperoleh sumber daya baru dalam mempromosikan ideologi NU yang “otentik” dan menantang ideologi NU yang dominan bercorak Islam moderat yang dipromosikan oleh kepemimpinan NU saat ini.

Hasil kajian ini menunjukkan *framing* yang dilakukan oleh NU Garis Lurus dalam situsnya membingkai tiga aspek. *Pertama* NU Garis Lurus menggunakan situs web untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi NU. *Kedua* menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi warga NU. *Ketiga* menciptakan narasi-narasi motivasi untuk mendapatkan dukungan dalam merekrut pengikut dan simpatisan baru untuk bergabung dengan NU Garis Lurus.

Buku ini dilanjutkan dengan pembahasan pada bagian ketujuh yang ditulis oleh Syafiq Hasyim yang dengan judul *MUI and its Discursive Relevance for “ Aksi Bela Islam” a Growing Trend of Islamic Conservarism in*

Indonesia (h.116-132). Artikel ini mengkaji peran penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hubungannya dengan gerakan Aksi Bela Islam (ABI). Dalam kasus penistaan agama yang menimpa Ahok, MUI mengeluarkan keputusan terkait penistaan agama yang dilakuan oleh Ahok. Menurut Hasyim bahwa Fatwa konservatif tentang penistaan agama ini, bukanlah kali pertama dikeluarkan oleh MUI. Sejak mulai berdirinya MUI, telah dikeluarkan fatwa serupa, dan juga beberapa keputusan lainnya yang terkait dengan penistaan agama dan juga pemimpin non-Muslim di Indonesia. Keputusan yang dikeluarkan oleh MUI dalam aksi bela Islam merupakan pembenaran teologis untuk menuntut hukuman terhadap Ahok karena dinilai melakukan penistaan agama dan juga sebagai strategi kampanye politik publik dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Artikel ini menggambarkan kecenderungan semakin meningkatnya konservatisme Islam dalam tubuh organisasi MUI. Dalam perjalanan sejarahnya terdapat pergeseran orientasi kelembagaan MUI dengan variasi yang berbeda antara satu rezim dengan lainnya. Pada era Soharito, MUI merupakan mitra pemerintah dalam mensosialisasikan Islam dalam kehidupan publik. MUI dirancang untuk menyebarkan ajaran Islam yang sejalan dengan kepentingan rezim penguasa. Pasca-Orde Baru orientasi MUI menjadi lebih konservatif dalam beragama dan sangat kritis dalam politik. Dalam perkembangan selanjutnya, pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono MUI berperan sebagai penjaga aqidah dan moral masyarakat yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, terdapat penggabungan kepentingan yang sama antara MUI dengan ormas Islam lainnya, seperti FPI, HTI, FUI dan MMI dalam kasus penistaan agama yang menimpa Ahok.

Meskipun MUI telah mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI dalam kasus Ahok, di mana pendapat tersebut dapat dipertimbangkan nilainya lebih tinggi dari fatwa, tetapi dalam kenyataannya menurut Hasyim, pendapat dan sikap keagamaan tersebut sama saja dengan fatwa. Bahkan menurut Hasyim, sikap MUI dalam kasus Ahok tidak dapat dilepaskan dari faktor politisasi di mana MUI

dianggap menggunakan fatwa tersebut untuk dihubungkan dengan kepemimpinan Islam. Sementara Fatwa MUI yang ada selama ini, terutama berkaitan tentang sifat kepemimpinan dalam Islam dapat berubah dari waktu ke waktu. Hubungan MUI dengan aksi bela Islam pasca-Ahok dijatuhi hukuman, cenderung mengambil jarak dengan aksi bela Islam. Di sisi lain, MUI lebih cenderung menjalin aliansi dengan rezim yang berkuasa, yaitu pemerintahan Jokowi karena dinilai lebih strategis daripada menjalin aliansi dengan kelompok aksi bela Islam, meskipun tidak tertutup kemungkinan aliansi antara keduanya (MUI-ABI) dapat terjalin kembali ketika bertemu dalam isu-isu yang bersifat pragmatis dan teologis. Dinamika seperti ini akan terus mempengaruhi hubungan MUI dengan pemerintah pada masa-masa yang akan datang.

Bagian kedelapan dalam buku ini adalah artikel yang ditulis oleh Masdar Hilmy dengan judul *The Rise and Fall of "Transnational" Islam in Indonesia: the Future of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)*. (h. 133-145). Artikel ini menjelaskan tentang sejarahnya muncul HTI hingga dibubarkan di bawah pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. HTI merupakan organisasi Islamis pertama yang dibubarkan pemerintah karena dinilai bertentangan dengan Pancasila melalui Perpu Ormas. Meskipun secara organisasi HTI telah dibubarkan, tetapi tidak menghapuskan ideologi khilafah yang diperjuangkannya, karena menurut Hilmy, ideologi itu muncul dan dapat diciptakan dalam struktur kesempatan tertentu yang terdapat di masyarakat. Selama masalah kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan sosial, penindasan politik masih menyelubungi kehidupan masyarakat Muslim, maka ideologi khilafah akan muncul kembali dalam bentuk yang sama maupun dengan kecenderungan lainnya.

Pelarangan HTI yang dilakukan oleh pemerintah sama dengan perlakuan yang diterima HTI di bawah rezim Orde Baru Soeharto, di mana pemerintah membatasi ruang gerak kelompok Islamis termasuk HTI. Meskipun HTI telah dilarang melalui Perpu, tetapi

anggota, kader, simpatisan dapat menghidupkan lagi ideologi khilafah dengan mudah jika situasi sosial dan politik menuntutnya, karena tidak ada yang bisa menjamin Perpu ormas dapat diterapkan lintas waktu dan rezim. Jika dukungan dan peluang didapatkan, dan terdapat kekosongan kekuasaan, mereka bisa melakukan revitalisasi ideologi khilafahnya dan akan kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Ideologi khilafah akan muncul ketika negara mengalami krisis, baik krisis sosial maupun krisis ekonomi dan politik. Ketika negara mengalami krisis, maka otoritas negara juga mengalami penurunan. Selama kesempatan ada, maka ideologi khilafah akan muncul kembali laksana ratu adil yang dapat mengembalikan keseimbangan sosial-politik. Berdasarkan argumen ini, ideologi khilafah berada di luar jangkauan Perpu, yang tidak dapat membunuh ideologi, hanya dapat membungkam perambatan aktivitiasnya di lingkup publik.

Menurut Hilmy, cara paling efektif untuk mengakhiri ideologi apa pun bukan dengan melarangnya, tetapi dengan menutup kemungkinan kebangkitannya. Pertanyaan adalah apakah Indonesia dapat mempertahankan keseimbangan sosial dan politiknya dalam jangka panjang. Jika tidak, ideologi berbasis agama seperti khilafah dan gagasan negara Syariat akan terus tumbuh seperti jamur di musim hujan. Jika negara tidak dapat memberantas masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, perampasan ekonomi dan penindasan politik, ideologi khilafah cenderung tumbuh dan mendapatkan pegangan yang kuat di tengah krisis sosial dan politik yang menghinggapi negara. Artikel ini ditutup dengan argumen bahwa untuk meniadakan ideologi tertentu bukan dengan cara melarangnya, tetapi dengan mengatasi struktur peluang yang memunculkannya. Di Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan keseimbangan struktural yang berlangsung antara negara dan masyarakat.

Bagian kesembilan dalam buku ini adalah artikel yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ahnaf dengan judul *Why Do Islamist Movement Die? Majelis Mujahidin Indonesia and its Decline*. (h.146-162). Artikel ini membahas

tentang penurunan aktivitas Majelis Mujahidin Indonesia yang disebabkan oleh kombinasi tekanan negara dan dinamika internal dalam tubuh organisasi yang mengarah pada ambang keruntuhan. Penurunan aktivitas MMI sudah dimulai sejak pamimpin utamanya Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir (*Ahl Halli Wal Aqdi*) meninggalkan MMI pada tahun 2008 dan bergabung dengan organisasi baru Jamaah Ansorut Tauhid (JAD). Perpindahan Amir MMI tersebut juga diikuti oleh sejumlah anggota MMI yang mengikuti jejak Ba'asyir bergabung dengan JAD. Perpecahan ini tidak hanya memengaruhi dinamika internal organisasi, tetapi juga memengaruhi visi organisasi, antara memilih strategi perjuangan menggunakan cara kekerasan atau politik akomodasi dengan cara non-kekerasan. Hal ini ditandai dengan sikap pemimpin MMI dalam merespons unjuk rasa aksi bela Islam beberapa waktu lalu. Ini merupakan titik awal penurunan aktivitas organisasi MMI.

Menurut artikel ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan penurunan aktivitas MMI. *Pertama*, kegagalan organisasi dalam memperjuangkan visi organisasinya, seperti memperjuangkan penerapan syari'at Islam di tingkat regional dan nasional. Meskipun dalam tingkat tertentu berhasil mewujudkan visi tersebut, tetapi upaya tersebut gagal menarik masyarakat secara umum. *Kedua*, berkaitan dengan kepemimpinan dan mobilisasi sumber daya dalam tubuh organisasi. Kepemimpinan Ba'asyir relatif efektif dalam memimpin organisasi sehingga dapat diandalkan sebagai sosok yang diikuti. *Ketiga*, sementara Ba'asyir pindah ke JAD, MMI kehilangan kemampuannya untuk menyelenggarakan pertemuan massa. Selain itu MMI juga tidak bisa mengembangkan pendanaan melalui badan amal atau konsesi bisnis dengan para elit politik setempat. Akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi yang ada, maka organisasinya mengalami stagnasi dalam pergerakan. *Keempat* tidak memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam mempromosikan visi organisasinya. Dengan demikian MMI lebih memilih berpartisipasi dengan kelompok lain ketimbang organisasinya sendiri secara mandiri.

Penurunan aktivitas organisasi MMI ini telah mengubah strategi perjuangannya dari menggunakan cara kekerasan menjadi bagian dari kontestasi politik. Para pemimpin MMI lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menolak jalan ekstremisme kekerasan. Meskipun MMI telah mengalami perubahan dalam hal perjuangan organisasi, akan tetapi doktrin '*is kariman au mut syahidan* (hidup mulia atau mati syahid) masih tetap dipegang teguh oleh anggota MMI.

Bagian kesepuluh artikel dalam buku ini adalah tulisan Yon Machmudi yang berjudul *The PKS and Tarbiyah Movement*. (h.163-180). Artikel ini membahas tentang cara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memandu faksi yang muncul dalam tubuh partainya, yaitu antara tradisional dan revivalis. Kepemimpinan PKS saat ini lebih bercorak tradisional dibandingkan dengan kepemimpinan pada masa sebelumnya yang cenderung revivalis. Perdebatan muncul dalam PKS berkaitan dengan sikap partai apakah sebagai oposisi pemerintahan yang berkuasa dalam hal ini mendukung Jokowi atau cenderung akomodatif dalam menerima manfaat dari perlindungan negara. Mahmudi menggambarkan bahwa meskipun PKS sering terlihat sebagai partai politik yang cenderung konservatif, tetapi terdapat variasi dalam dinamika internalnya yang melukis gambaran yang lebih kompleks tentang memposisikan dirinya secara politik.

Di level organisasi sayap kanan partai, relasi antara Jamaah Tarbiyah dengan partai PKS telah berhasil menyelesaikan perselisihan teologis atas isu politik dan keterlibatan umat Islam dalam menerima demokrasi modern. PKS menggunakan demokrasi sebagai sarana dalam melakukan transformasi negara sesuai dengan ajaran Islam. Penerimaan secara serius terhadap demokrasi sebagai sistem politik pluralistik tidak hanya ditingkat elite tapi juga ditingkat akar rumput. Tindakan politik PKS didasarkan pada premis bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Ini hanya dapat dicapai melalui disiplin kader dan transformasi masyarakat secara bertahap, dan demokrasi menyediakan cara untuk mencapai tujuan ini. Demikian pula pendekatan pragmatis

yang dikedepankan PKS di arena politik praktis. Perubahan kepemimpinan PKS saat ini tidak hanya membuat PKS mengadopsi agenda yang lebih moderat, seperti yang ditunjukkan dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi juga menimbulkan perubahan dan tantangan internal. Perubahan internal yang dilakukan oleh pimpinan baru PKS tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan dan memperoleh tantangan yang cukup kuat dari dalam partai. Dinamika internal yang terjadi dalam tubuh partai tidak lagi terkait perbedaan ideologis, tetapi menyangkut kepentingan individu dan sikap elite partainya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial politik yang terjadi. Dalam rangka memperluas konstituensi politiknya, PKS telah secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap ideologi Indonesia dan rasa hormat terhadap kelompok arus utama Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Bagian kesebelas dalam buku ini ditulis oleh Andar Nubowo yang berjudul *Indonesian Hybrid Salafism: Wahdah Islamiyah's Rise, Ideology and Utopia*. (h.182-196). Artikel ini menggambarkan organisasi salafi Islam yaitu Wahdah Islamiyah yang berpusat di Sulawesi Selatan. Artikel ini menjelaskan tentang perkembangan organisasi Wahdah Islamiyah, mulai dari metode dakwah dan tarbiyah, ideologi, gagasan NKRI bersyar'ah serta bagaimana organisasi tersebut membentuk gagasan seputar identitas Muslim di daerah tersebut.

Artikel ini dimulai dari sejarah kehadiran organisasi Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan berawal dari kekecewaan aktivis pemuda Muhammadiyah yang menolak Muhammadiyah menerima ideologi Pancasila. Kecewa dengan Muhammadiyah, mereka memisahkan diri dan membentuk yayasan baru pada tahun 1988. Pada era Reformasi, yayasan ini disulap menjadi organisasi massa Salafi Wahdah Islamiyah, dengan visi adalah Islamisasi Indonesia dengan syariah (syariat Islam) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wahdah Islamiyah merumuskan agama sebagai dasar dalam penyebaran metode dakwah (*proliferasi Islam*) dan tarbiyah (pelatihan dan pendidikan

Islam), serta membangun jaringan Salafi untuk ekspansinya dari organisasi lokal ke nasional. Argumen artikel ini adalah setelah memisahkan diri dari Muhammadiyah pada pertengahan 1980-an, organisasi ini mampu berkembang pesat dengan menggabungkan ideologi salafi yang murni dengan pendekatan pragmatis dalam pembangunan sosial-ekonomi dan politik lokal. Hal ini memungkinkan Wahdah Islamiyah menjadi organisasi Islam yang berpengaruh dan banyak diterima di Sulawesi Selatan hanya dalam waktu dua dekade.

Bagian kedua belas buku ini adalah artikel yang ditulis oleh Najib Kailani yang berjudul *Creating Entrepreneurial and Pious Muslim Subjectivity in Globalised Indonesia*.(198-209). Artikel ini menjelaskan konservatisme Islam yang telah mendorong munculnya "Islam pasar". Hal ini terlihat dari semakin banyak munculnya buku-buku yang berkaitan dengan pembedayaan umat Islam dan seminar motivasi yang mendorong umat Islam kelas menengah untuk meningkatkan keimanan mereka sembari tetap mempertahankan nilai-nilai kapitalis tradisional, seperti konsumsi dan akumulasi kekayaan.

Artikel ini berpendapat bahwa konservatisme Islam tidak selalu berarti peningkatan intoleransi atau keinginan mendirikan negara Islam, tetapi dapat juga digunakan untuk mendorong umat Islam kelas menengah untuk mengejar peningkatan kemakmuran dan materialisme. Semakin semaraknya pelatihan yang berkaitan dengan motivasi dan keberhasilan telah menumbuhkan gagasan "muslimisme" yang berorientasi pasar dan peningkatan kesalehan individu yang berpusat pada komunitas yang berbeda dari islamisme negara. Gagasan islamisme ini berorientasi pada individu yang sepenuhnya terbuka dengan cara hidup modern. Menjadi Muslim bukan berarti menentang modernitas atau pasar Barat, melainkan bisa berjalan bersamaan dengan modernitas. Dengan kata lain, Islam pasar telah menciptakan menjadi muslim dapat beradaptasi dengan kehidupan global dan sekuler. Menjamurnya Islam pasar di kalangan kelas menengah Muslim juga diikuti dengan semakin meningkatnya pelatihan-pelatihan

yang berkaitan dengan motivasi. Mereka menggunakan teori manajemen populer Barat dan mencocokkannya dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam rangka menyebarkan gagasan tersebut, mereka aktif mempromosikannya melalui publikasi dan seminar, khususnya di kalangan muslim perkotaan Indonesia.

Buku ini ditutup dengan artikel berjudul *Conservative Islam and Dilemma of Indonesian Democracy* yang ditulis oleh para dewan editor. (h.210-220). Kebangkitan konservatisme Islam yang terjadi belakangan ini memiliki sejumlah implikasi terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Buku ini diakhiri dengan prediksi bahwa Islamisme konservatif akan tetap menjadi pengaruh penting dalam perkembangan politik dan sosial-ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ini kelompok-kelompok konservatif ini telah berkembang, dan mereka tidak terbatas pada penggunaan hanya satu kendaraan saja, yaitu agama, tetapi memiliki cara lain dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Konservatisme dalam beragama punya korelasi dengan konservatisme dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya. Fakta ini didukung oleh sejumlah bukti, seperti dukungan terhadap islamisasi publik, penolakan terhadap pemimpin non-Muslim, diskriminasi terhadap sekte minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah, dan semakin menjamurnya perumahaman muslim yang eksklusif yang muncul di kawasan perkotaan (urban) di kota-kota besar. Selain itu isu sosial politik seperti apakah non-Muslim dapat dipilih sebagai pemimpin nasional atau lokal dan isu ekonomi seperti sertifikasi halal dan perumahan syariah dapat di instrumentalisasi oleh kelompok-kelompok ini sebagai bagian dari aspirasi politik mereka.

Penutup

Hubungan antara kebangkitan konservatisme agama dan demokrasi dapat berjalan secara akomodatif. Kehadiran kelompok konservatif bukan dijadikan musuh yang harus disingkirkan dalam demokrasi, melainkan juga dapat dianggap sebagai mitra yang dapat memberikan masukan positif terhadap negara. Negara mestinya merespons kehadiran kelompok

konservatif dengan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi sehingga demokrasi Indonesia dapat bekerja lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buku ini memberikan sumbangan yang sangat penting dalam menjelaskan fenomena gerakan Islam dan hubungannya dengan politik, demokrasi, sosial, ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai pendekatan alternatif dalam menjelaskan kebangkitan Islam di Indonesia. Sebab selama ini, para sarjana menjelaskan gerakan Islam dari perspektif islamisme, fundamentalisme, islam politik, revivalisme radikalisme, terorisme. Padahal istilah-istilah tersebut memiliki perbedaan makna dan konteks yang berbeda antara satu dengan lainnya. Buku ini melengkapi studi-studi sebelumnya tentang konservatisme agama dengan menitikberatkan pada kelompok Islam dan berkembangnya politik identitas. Perkembangannya konservatisme Islam dalam organisasi Islam dan politik identitas belum begitu banyak diungkap secara mendalam. Selain itu, karya ini juga didedikasikan untuk mengenang Almarhum Profesor Bahtiar Effendy (1958-2019) sebagai seorang guru, intelektual, cendekiawan semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik oleh Allah dan dilimpahkan *rahmat dan maghfirahnya*.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N., & Mohamed Osman, M. N. (2018). Islamisation in the Indonesian media spaces new sites for a conservative push. *Journal of Religious and Political Practice*, 4(3), 214–232. <https://doi.org/10.1080/20566093.2018.1525894>
- Aidulsyah, F., & Mizuno, Y. (2020). The Entanglement Between Anti-Liberalism and Conservatism: The INSISTS and MIUMI Effect Within the “212 Movement” in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 1–25. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.1-25>
- Al-Qurtuby, S. (2019). Bangkitnya Konservatisme di Dunia Islam. Retrieved from <https://sumantoalqurtuby.com/bangkitnya-konservatisme-di-dunia-islam/>
- Amalinda Savirani. (2020). Post-Election Politics in Indonesia: Between Economic Growth and Increased Islamic Conservatism. In M. C. and D. Singh (Ed.), *Southeast Asian Affairs 2020* (pp. 137–154). Singapore: Iseas Yusuf Ishak Intitute.
- Azymardi Azra. (2019a). Konservatisme Agama (1). *REPUBLIKA.CO.ID*.
- Azymardi Azra. (2019b). Konservatisme Agama (2). *REPUBLIKA.CO.ID*.
- Azymardi Azra. (2019c). Konservatisme Agama (3). *Republika.Co.Id*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/pwambh282/konservatisme-agama-3>
- Bruinessen, M. Van. (2011). RSIS Working Paper. In *What happened to the smiling face of Indonesian Islam? : Muslim intellectualism and the conservative turn in post-Suharto Indonesia* (No. 222). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10220/7533>
- Burhani, A. N. (2013). Liberal and Conservative Discourses in the Muhammadiyah: The Struggle for the Face of Reformist Islam in Indonesia. In M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesia Islam Explaining the “Conservative Turn”* (pp. 105–140). Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies.
- Burhani, A. N. (2016). Aksi Bela Islam : Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan. *Maarif Institute for Cultural and Humanity*, 11(2), 16.
- Burhani, A. N. (2019). Lessons from Madura: NU, Conservatism and the 2019 Presidential Election. *Perspective*, (72), 1–9. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_72.pdf
- Eunsook Jung. (2020). Mobilizing on Morality: Conservative Islamic Movements and Policy Impact in Contemporary Indonesia. In N. S. and A. N. Burhani (Ed.), *The New Santri: Challenges to Traditional Religious Authority in Indonesia* (pp. 105–129). Singapore: Iseas Yusuf Ishak Intitute.
- Fachrudin, Z. A. B. and A. A. (2020). Democracy and The “Conservative Turn” in Indonesia. In N. S. & A. Ibrahim (Ed.), *Alternative Voices in Muslim Southeast Asia* (pp. 139–155). <https://doi.org/10.1355/9789814843812>
- Fealy, G. (2017). A Conservative Turn. Retrieved December 10, 2020, from 15 Juli website: <https://www.insideindonesia.org/a-conservative-turn>
- Halimatusa’diyah, L. (2020). *Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia* (Vol. 1). Tangerang Selatan.
- Hasyim, S. (2020). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>
- Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam ? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On Whatever Happened to Civil Islam ? Islam and Democratisation in Indonesia , 20 Years On. *Asian Studies Review*, 43(3), 375–396. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Ismail, S. (1998). Confronting the Other : Identity , Culture , Politics , and Conservative Islamism in Egypt. *International Journal of Middle East Studies*, 30(2), 199–225.
- Kirana, D., & Garadian, E. A. (2020). Religious trend in contemporary indonesia: Conservatism domination on social media. *Studia Islamika*, 27(3), 615–622. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.18823>
- Luthfie Assaukanie. (2017). Unholy Alliance: Ultra-Conservatism and Political Pragmatism in Indonesia. *Thinking asean*, 19, 6-9. *Thinking Asean*, 19.

- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia : Religious Intolerance , Militant Groups and the Politics of Accommodation Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia : Religious Intolerance , Militant Groups and the Politics of Accommo. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Nur Ichwan, M. (2013). Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy. In M. van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the “Conservative Turn,.”* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Osman, M. N. M. (2017). The Islamic conservative Turn in Malaysia: Impact and Future Trajectories. *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s11562-016-0373-3>
- Priamarizki, A., & Dinarto, D. (2019). Capturing Anti-Jokowi Sentiment and Islamic Conservative Masses Pks 2019 Strategy. *RSIS Working Paper S.Rajaratnam School of International Studies*, 324(November).
- Sebastian, L. C., & Nubowo, A. (2019). The “Conservative Turn” in Indonesian Islam: Implications for the 2019 Presidential Elections. *Asie Visions IFRI Center for Asian Studies*, 106(March).
- Van Bruinessen, M. (2013). Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.” In M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”* (pp. 1–240). <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.850644>
- Vedi R Hadiz. (2019). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES.

